

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara*, 2009, *Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Didi nazmi, 1992 *Konsepsi Negara Hukum*, Padang : Angkasa Raya.

Donald Parulian, 1997, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Eddy Purnama, 2005, *Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan Sebagai Impementasi dari Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*, Bandung : Nusa Media.

Eric C. Bjornlund, 2004, *Beyond Free and Fair. Monitoring Elections and Building Democracy*, John Hopkins University Press.

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshidiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus - Politik Hukum Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Kacung Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah (Pleajaran dari Pilkada Secara Langsung)*, Surabaya : Eureka dan PusDeHAM.

- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nur Hidayat Sardini, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Ramlan Soebakti dan Didik Supriyanto, 2013, *Partisipasi Warga Negara dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kemitraan.
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saldi Isra, Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Inodnesia*, Depok: PT Grafindo Persada.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Yulianto, Veri Junaidi, dan August Mellaz, 2010, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU.

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007.

C. Jurnal

ACE Electoral Knowledge Network; *Inter Parliamentary Union's Declaration on Free and Fair Election; Organizations for Security and Cooperation In Europ's International Election Observation Standards.*

Fadli Ramadhani dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2015.

Hendra Nurtjahyo, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No. 3 Juli-September. 2005.

Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi dan Ibrohim, "*Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999 – 2014*", Jurnal Hukum, 2015.

Muhammad Addi Fauzani, Yuniar Riza Hakiki, *Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum (Pemilu) Guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 3, 2018.

Simanjuntak N.Y, *Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*, Jurnal Hukum, Vol.3 No. 3 2017.

Topo Santoso, *Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1, Nomor 4, Juli 2004.

D. Website atau Sumber Internet

“Sejarah Pemantau Asing di Indonesia”, <https://tirto.id/sejarah-pemantau-asing-di-indonesia-bermula-pada-Pemilu-1999-dkmU>

“Tugas KPU”, <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/5/Tugas-dan-Kewenangan>

“Tugas dan Wewenang Bawaslu”, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>

“Aturan Hukum Lembaga Pemantau Asing dalam Pemilu di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c9c85ad4d038/lembaga-pemantau-asing-dalam-Pemilu-di-indonesia--begini-aturan-hukumnya/>

“Pemantau Luar Negeri Tahun 2019 di Pemilu Indonesia”, <https://Pemilu.tempo.co/read/1196390/bawaslu-pemantau-Pemilu-sebanyak-138-terbanyak-dalam-sejarah/full&view=ok>

“pengertian Pemilu”, <https://www.silontong.com/2018/07/07/pengertian-Pemilu/#>

“pengertianKPU”, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2015/12/pengertian-kpu-beserta-fungsinya.html>

“pengertianBawaslu”, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-bawaslu.html>

“akreditasi lembaga pemantau pemilu oleh Bawaslu”
<http://ayocirebon.com/read/20181024/122/1707/bawaslu-ri-akreditasi-17>

lembaga pemantau-pemilu

“pemantau pemilu internasional dan kegawatan pemilu serentak indonesia”